



# LAPORAN

## KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### (LKj-IP)

#### TAHUN ANGGARAN 2016



**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
Jl. A. Wahab Syahrani  
Sanggata  
2017

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2016 dapat diselesaikan.

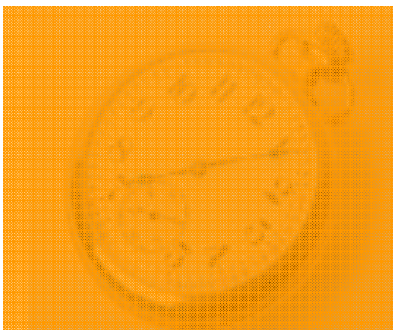
Laporan Kinerja BKP Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014, bahwa setiap Unit Kerja / SKPD wajib melaporkan hasil kerja program, kegiatan dan anggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati Kutai Timur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain: merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan menuju terwujudnya *good governance*, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan kinerja ini merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Guna mengetahui kinerja (*performance*) pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan selama Tahun 2016, serta awal pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021 dan Renstra SKPD 2016 – 2021, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016. Indikator sasaran yang ditargetkan sebagian telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu ketersediaan energi dan protein. Capaian kinerja tersebut merupakan dampak pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 yang telah dilaksanakan BKP serta dukungan pemangku kepentingan mulai dari kecamatan hingga para Petani.

Dalam Laporan ini tentunya masih banyak kekurangannya maupun kesalahan, sehingga kami berharap adanya saran, kritik, dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Sangatta, Februari 2017  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Kutai Timur,

**H. Hormansyah, SP**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19590829 198103 1 006



## **BAB I**

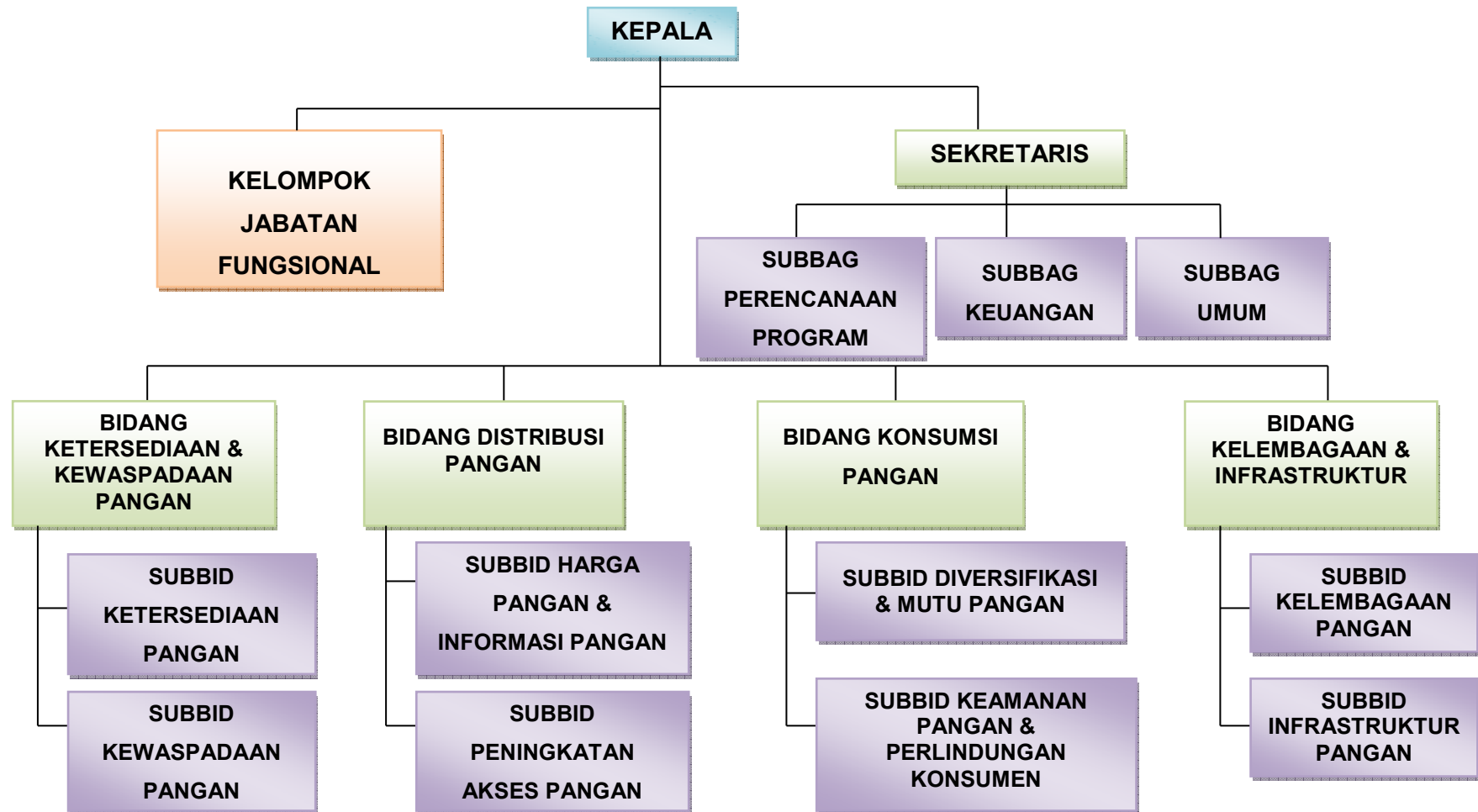
# **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya, yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya, Badan Ketahanan Pangan (BKP) memiliki tugas pokok membantu Bupati Kutai Timur **dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan**. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, ketersediaan dan kewaspadaan pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, serta Kelembagaan dan Infrastruktur;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan setiap Eselon III didukung oleh 2 (dua) Eselon IV, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Tugas pokok setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut:

## **1. Sekretariat**

**Sekretariat (Sekretaris)** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sekretariat dan pelayanan teknis serta administrative kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Ketahanan Pangan yang meliputi perencanaan program, umum, dan keuangan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) SuB Bagian, yaitu: Sub Bagian Perencanaan Program, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan.

- a. **Sub Bagian Perencanaan Program**, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan badan.
- b. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas mengelola administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan pengarsipan, penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi barang milik daerah, hubungan masyarakat, dan protokol, serta tugas umum lainnya.
- c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan urusan keuangan.

## **2. Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan**

**Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan.

Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Sub Bidang Kewaspadaan Pangan.

- a. **Sub Bidang Ketersediaan Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan, serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Ketersediaan Pangan;
- b. **Sub Bidang Kewaspadaan Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Pangan.

### 3. Bidang Distribusi Pangan

**Bidang Distribusi Pangan** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengorganisasikan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang distribusi pangan.

Bidang distribusi pangan membawahi Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan dan Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan.

- a. **Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Harga dan Informasi Pangan.
- b. **Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan**, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Akses Pangan.

### 4. Bidang Konsumsi Pangan

**Bidang Konsumsi Pangan** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang konsumsi pangan.

Bidang Konsumsi Pangan membawahi Sub Bidang Pengembangan Diversifikasi dan Mutu Pangan serta Sub Bidang Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen.

- a. **Sub Bidang Pengembangan Diversifikasi dan Mutu Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Diversifikasi dan Mutu Pangan.
- b. **Sub Bidang Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen.

### 5. Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur

**Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program dan kegiatan lingkup bidang kelembagaan dan infrastruktur.

Bidang Kelembagaan dan Infrastruktur membawahi Sub Bidang Kelembagaan Pangan dan Sub Bidang Infrastruktur Pangan.

- a. **Sub Bidang Kelembagaan Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Pangan.
- b. **Sub Bidang Infrastruktur Pangan**, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan serta melaksanakan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur Pangan.

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 96 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Pejabat Eselon II, 5 (lima) orang Pejabat Eselon III, 11 (sebelas) orang eselon IV, 25 orang staf, dan 54 (lima puluh empat) orang Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah PNS BKP Kutai Timur Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Jenis Kelamin	Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jmlh
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Laki-laki	0	0	0	0	1	1	1	0	4	5	2	3	6	2	0	0	0	25
2	Perempuan	0	0	0	0	1	2	2	0	4	4	3	2	0	0	0	0	0	18
	Jumlah	0	0	0	0	2	3	3	0	8	9	5	5	6	2	0	0	0	43

Sumber: BKP Kutai Timur, 2015

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	SD	SLTP	SMU	S1	S2	S3	Jumlah
1	Laki-laki	0	0	4	16	5	0	25
2	Perempuan	0	0	5	10	3	0	18
	Jumlah	0	0	9	26	8	0	43

Sumber: BKP Kutai Timur, 2015

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung
- b. Komputer sebanyak ...unit,

c. Televisi

d.

## **1.2. Fungsi Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: **“Terwujudnya Kutai Timur Mandiri Melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan”**.

Secara singkat Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya dengan penggunaan sumberdaya, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta antisipasi dan penurunan kerawanan pangan;
2. Mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal;
3. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan dukungan manajemen serta pemantauan dan evaluasi.

## **1.3. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur**

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan;
2. Potensi kerawanan pangan di Kutai Timur relatif tinggi diakibatkan oleh terbatasnya infrastruktur dasar perdesaan, dan kemiskinan;
3. Ketidاكلancaran dan ketidakjelasan proses distribusi pangan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;



5. Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
6. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
8. Masih terbatasnya sumberdaya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;
9. Masih kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;
10. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis “**Terwujudnya Kutai Timur Mandiri melalui Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan**”, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur merumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### Tujuan:

1. Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan;
2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal;
3. Memperkuat kelembagaan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

##### Sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*) dan meningkatnya akses pangan (*food acces*);
2. Meningkatnya penyerapan pangan (*food utilization*);
3. Meningkatnya koordinasi para pemangku kepentingan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan;
4. Meningkatnya sistem pelayanan, pelaporan, dan kesekretariatan Badan Ketahanan Pangan.

Tabel 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
<b>Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta antisipasi dan penurunan kerawanan pangan</b>			
Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan ( <i>food availability</i> ) dan meningkatnya akses pangan ( <i>food acces</i> )	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 bulan
			Pengembangan cadangan pangan hidup (Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan)

1	2	3	4
			Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat
			Pengembangan Sistem cadangan pangan melalui LDPM ataupun lembaga lainnya
		Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan ketersediaan pangan berbasis non beras (Umbi-umbian)
			Pengembangan ketersediaan pangan berbasis kacang-kacangan (non kedelai)
			Pengembangan produksi pangan pada daerah lahan kering
		Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat
		Menjaga stabilisasi harga pangan	Peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
			Pengembangan sistem informasi harga, pasokan dan akses pangan
			Pengembangan operasi pasar pada waktu paceklik pada komoditas pangan strategis
		Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan	Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan
			Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			Peningkatan akses pangan masyarakat
1	2	3	4
<b>Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal</b>			
Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal	Meningkatnya penyerapan pangan ( <i>food utilization</i> )	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatkan peran kelembagaan lokal dalam sosialisasi dan penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi
			Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye / promosi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman

1	2	3	4
			Melakukan sosialisasi peng-anekaragaman pangan pa-da keluarga
			Meningkatkan pengetahuan pada anak sejak dini tentang penganeekaragaman pangan
			Mengembangkan dan me-nyediakan paket-paket teknologi agroindustri pa-ngan skala perdesaan
			Meningkatkan keterampilan masyarakat dengan melaku-kan penyuluhan, pembi-naan dan pengembangan agroindustri perdesaan
			Mengembangkan agroin-dustri pangan untuk pro-duksi pangan pokok kar-bohidrat non beras, non terigu dan sumber protein hewani, serta sayur dan buah
		Meningkatkan pena-nganan keamanan pangan	Pengembangan penga-wasan keamanan pangan
Mengembangkan sistem pengawas-an keamanan pangan	Tercapainya pem-binaan dan peng-awasan keaman-an pangan	Meningkatkan kesa-daran mutu dan kea-manan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen	Pembinaan mutu dan keamanan pangan
			Pengembangan sertifikasi dan pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada produk Pangan Segar
1	2	3	4
<b>Mendorong berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan, dan memfasilitasi peningkatan pengelolaan manajemen kelembagaan ketahanan pangan masyarakat</b>			
Memperkuat Ke-lembagaan Keta-hanan Pangan da-lam rangka pe-nyelenggaraan Ketahanan Pa-ngan Berkelan-jutan	Meningkatkan ko-ordinasi antar tingkat pemerin-tahan melalui Ra-pat Dewan Keta-hanan Pangan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
		Meningkatkan pem-berdayaan kelemba-gaan pangan masya-rakat secara terpadu dan berkelanjutan	Optimalisasi dan pember-dayaan kelembagaan pa-ngan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan
Meningkatkan ko-ordinasi dalam pe-rumusan kebi-jakan ketahanan pangan	Tercapainya efek-tifitas koordinasi perumusan kebi-jakan ketahanan pangan	Meningkatkan koordi-nasi dan sinkronisasi perencanaan pemban-gunan ketahanan pangan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan

<b>Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan yang berwawasan lingkungan</b>			
1	2	3	4
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
	Meningkatnya sistem pelayanan dan kesekretariatan		
	Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan disiplin aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur BKP Kutai Timur	Penerapan reward and punishment
	Meningkatnya sistem pelaporan		

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan serta sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan 5 (lima) program yang masuk urusan ketahanan pangan dengan 34 kegiatan di dalamnya, yang didukung dari APBD Kabupaten Kutai Timur. Total Anggaran sebesar Rp. 2.685.010.651,00

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur dengan Bupati Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumberdaya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2016, Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, terdapat 9 (sembilan) sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2016, yaitu:

- a. **Sasaran 1:** Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*) dan meningkatnya akses pangan (*food access*)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 3):



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketersediaan pangan & akses pangan	1. Jumlah ketersediaan energi per kapita (KKal/Kap/Hr)	2.400	2.511,65	109,52	2.233	109,52
	2. Jumlah ketersediaan protein per kapita (Gram/Kap/Hr)	63	83,49	132,52	93,96	132,52
	3. Persentase ketersediaan pangan utama (%)	83,00	83,10	100,12	78,52	83,27
	4. Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah equivalen beras (ton)	100	0	0,00	0,00	0,00
	5. Bertambahnya jumlah lumbung pangan masyarakat (Unit)	1	0	0,00	0,00	0,00
	6. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk komoditas pangan strategis di 18 Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	7. Terjaganya Stabilitas harga komoditas pangan strategis (CV berkisar $\leq 10\%$ ) (%)	5	5	100	6,5	100
Tertanganinya daerah rawan pangan	1. Prosentase penanganan daerah rawan pangan (%)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Jumlah desa rawan pangan yang tertangani (desa)	2	0	0,00	0,00	0,00

Capaian kinerja pada sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan (*food availability*) dan meningkatnya akses pangan (*food access*), dengan 5 (lima) indikator, masing-masing pencapaian sebagai berikut:

- 1). Lima indikator kinerja **melebihi target** yang ditetapkan, dengan capaian sangat baik ( $\geq 90\%$ ) yaitu (i) Jumlah ketersediaan energi per kapita, (ii) Jumlah protein per kapita, dan (iii) Jumlah ketersediaan pangan utama (beras); (iv) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk komoditas pangan strategis di 18 kecamatan; (v) Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis ( $CV \leq 10\%$ ).
- 2). Dua indikator kinerja **tidak dapat mencapai target** yang ditetapkan, yaitu: (i) Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah equivalen 100 ton beras, dan (ii) Bertambahnya jumlah lumbung pangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Kutai Timur cukup aman. Namun demikian, terlampauinya target ketersediaan energi dan protein tersebut belum sepenuhnya menggambarkan Kondisi ketersediaan pangan utama, karena capaiannya baru 83,10%.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2015, capaian indikator energi dan protein yang masing-masing adalah 2.233,14 KKal/kapita/hari dan 93,96 Gram/kapita/hari menunjukkan adanya peningkatan dari sisi energi dan penurunan dari sisi protein. Berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) ke X, ketersediaan energi yang ditetapkan adalah 2.400 KKal/Kap/Hari dan protein sebesar 63 Gram/Kapita/Hari, yang berarti capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur melebihi target WKNPG.

Pada indikator 4 dan 5 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kegagalan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor dan permasalahan, antara lain:

- a. Masih belum adanya payung hukum untuk dijadikan acuan dalam penetapan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Belum adanya kesamaan persepsi dalam penetapan tanggung jawab antara bidang ketersediaan dan kewaspadaan pangan dengan bidang distribusi pangan;
- c. Penyediaan cadangan pangan pemerintah belum jadi prioritas, sehingga penyiapannya masih belum diutamakan;

- d. Dalam hal pembangunan lumbung masyarakat, kurang siapnya sumberdaya manusia Badan Ketahanan Pangan menyebabkan tidak terpenuhinya target yang ditetapkan.

Kondisi tersebut di atas perlu menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan, karena akan berpengaruh terhadap capaian target Renstra OPD. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi baik lingkup internal OPD Dinas Ketahanan Pangan, OPD terkait dan para pihak lainnya sangat diperlukan.

Pada indikator 6 dan 7 terlihat bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kestabilan dalam alur sistem informasi, baik dari aspek pasokan, harga maupun akses pangan. Di samping itu, kestabilan harga pangan juga telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 5% (rata-rata). Secara umum, harga komoditas pangan strategis dikatakan stabil jika fluktuasi harga yang ada di pasar berkisar antara 5% - 25%.

Capaian tahun 2016 ini sama dengan tahun 2015, untuk ketersediaan pasokan, harga dan akses pangan, yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk stabilitas harga pangan dari komoditas pangan strategis capaian CV adalah 6,5% (masih tergolong stabil).

b. **Sasaran 2:** Meningkatnya penyerapan pangan (*food utilization*)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 4):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya penyerapan pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	85,00	81,10	95,41	88,50	85,37
	2. Jumlah konsumsi pangan untuk memenuhi gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.200 KKal/Kapita/Hari;	2.200	1.994,1	90,64	2.156,6	90,64
	Protein sebesar 57 Gram/Kapita/Hari	57	57,2	100,35	63	100,35
	3. Penurunan konsumsi beras per kapita per tahun (%)	1	0,5	50,00	0,5	33,33
	4. Prosentasi pembinaan dan pengawasan pangan (%)	100,00	100,00	100,00	73,33	100,00

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh berdasarkan hasil survey konsumsi tahun 2014 dan 2015 serta perhitungan berdasarkan data susenas pada tahun 2016.

Pencapaian skor PPH pada Tahun 2016 masih tergolong sangat baik ( $\geq 90\%$ ), meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Kutai Timur sudah cukup baik (beragam, bergizi seimbang) meskipun belum memenuhi kondisi yang ideal.

Berdasarkan indikator 2, terlihat bahwa tingkat kecukupan energi maupun protein masyarakat Kabupaten Kutai Timur telah melebihi standar yang ditetapkan WKNPG ke X. Ini menunjukkan bahwa secara umum konsumsi pangan masyarakat cukup baik, meskipun belum dapat dikatakan ideal untuk pola konsumsi pangan.

Untuk mendukung kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) guna menerapkan pola makan beragam dan bergizi seimbang, pada Tahun 2014 dan 2015 Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Non Beras dan Terigu, serta mengikuti Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah: (1) belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan cenderung fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya beli.

Pada indikator ketiga (Penurunan konsumsi beras), dari target sebesar 1%, hanya dapat dicapai sebesar 0,5% atau setengah dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain pengaruh kebiasaan dan budaya “belum makan kalau belum makan nasi”. Melihat kondisi tersebut, maka pada waktu yang akan datang perlu dilakukan pendekatan antara lain:

- a. Sosialisasi pangan lokal pada murid SD/MI ataupun lainnya sehingga dapat memanfaatkan bahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) sebagai makanan dan minuman sehat dan menerapkannya dalam konsumsi sehari-hari;
- b. Kegiatan Gelar Pangan Tradisional Kabupaten Kutai Timur;
- c. Menggiatkan kembali Lomba Cipta Menu, mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten.

Ketergantungan konsumsi pada padi-padian terutama beras sebagai pangan pokok masih sangat tinggi, sedangkan pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.

Hal ini didukung oleh kajian para pakar gizi yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Kutai Timur baik di perkotaan atau pedesaan dan pada berbagai golongan pendapatan, hanya memiliki satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie (terigu). Melihat kondisi tersebut, maka upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi mutlak dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu 1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras, protein, vitamin dan mineral; 2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan 3) dimensi kesadaran gizi berupa aspek edukasi/pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

- c. **Sasaran 3 dan 4:** Meningkatnya koordinasi antar tingkat pemerintahan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan dan Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dan 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 5):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan	1. Jumlah regulasi ketahanan pangan yang dihasilkan (Perda/Perkada)	1	0	0,00	0,00	0,00
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	2. Jumlah rapat Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan (kali)	3	0	0,00	0	0,00
	3. Jumlah kelembagaan ketahanan pangan kecamatan yang diadvokasi (kec)	4	0	0,00	12	0,00



Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamakan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.

Satu diantara upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur adalah meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder lewat Dewan Ketahanan Pangan. Sayangnya, pada Tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan tidak mampu untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, baik pelaksanaan rapat dewan ketahanan pangan, advokasi kelembagaan ketahanan pangan kecamatan maupun penyusunan regulasi ketahanan pangan.

- d. **Sasaran 5:** Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dan 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 6):

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen Capaian	Capaian Tahun 2015	% Capaian thd Trgt Akhir Renstra (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	1. Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. Jumlah aparatur yang diikutsertakan diklat (orang)	11	11	100,00	100,0	20,00
	3. Prosentase ketepatan waktu penyampaian pelaporan (%)	100,00	50,00	50,00	75,00	50,00

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemampuan sumberdaya manusia aparat yang tersedia. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan operasional dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur merupakan prioritas yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.

Pada Tahun 2015, target pemenuhan kebutuhan sarana prasarana untuk operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dipenuhi 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan. Sedangkan jumlah aparatur yang ditingkatkan sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan realisasi juga sebanyak 11 (sebelas) orang atau 100,00%. Jika dibandingkan Tahun 2015 (5 orang), capaian kinerja tahun 2016 lebih besar.

Sedangkan untuk Prosentase ketepatan waktu penyampaian pelaporan justru mengalami penurunan dari tahun 2015 (75%) menjadi 50% di tahun 2016. Hal ini disebabkan semakin lambatnya pengumpulan informasi untuk memenuhi target ketepatan waktu penyampaian laporan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016 (Tabel 3. Sampai Tabel 6) yang meliputi 5 (Lima) sasaran strategis dan 18 (Delapan belas) indikator sesuai perjanjian kinerja tahun 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) indikator termasuk dalam kategori sangat baik ( $\geq 90\%$ );
- 0 (nol) indikator termasuk dalam kategori baik (70% - 89,99%);
- 0 (dua) indikator termasuk dalam kategori cukup (55% - 69,99%); dan
- 7 (tiga) indikator termasuk dalam kategori kurang (kurang dari 55%).

### **3.3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik**

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategik yang telah dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dapat disampaikan point-point sebagai berikut:

- 1). Ada 7 (tujuh) indikator kinerja yang termasuk dalam kategori kinerja kurang (< 55%), yang meliputi:
  - a. Jumlah ketersediaan pangan pemerintah ekuivalen beras (target 100 ton), dengan prosentase capaian 0%;
  - b. Bertambahnya jumlah unit lumbung pangan masyarakat (target 1 (satu) unit), dengan prosentase capaian 0%;
  - c. Prosentase penanganan daerah rawan pangan (target 100%), dengan prosentase capaian 0%;
  - d. Jumlah desa rawan pangan yang tertangani (target 2 (dua) desa), dengan prosentase capaian 0%;
  - e. Jumlah regulasi ketahanan pangan yang dihasilkan (target 1 (satu) perda/perbup), dengan prosentase capaian 0%;
  - f. Jumlah rapat Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan (target 3 (tiga) kali), dengan prosentase capaian 0%;
  - g. Jumlah kelembagaan ketahanan pangan kecamatan yang diadvokasi (target 4 (empat) kecamatan), dengan prosentase capaian 0%.
2. Masih terbatasnya Sumberdaya Manusia yang berkompeten dalam bidang ketahanan pangan merupakan kendala mendasar yang harus diatasi, sehingga kinerja pada tahun selanjutnya dapat ditingkatkan.
3. Belum berfungsinya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur merupakan faktor penghambat yang berakibat pada lemahnya koordinasi dan analisis kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur.
4. Belum adanya kesepahaman yang sama diantara personil Badan Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur.
5. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pencapaian kinerja Badan Ketahanan Pangan, khususnya terhadap target kinerja yang mendukung target RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016 – 2021.

### **3.4. Akuntabilitas Keuangan**

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan Negara adalah asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Kutai Timur, Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur untuk tahun 2016 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut:

Tabel 7. Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Kutai Timur Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			Satuan	Program	Anggaran (Rp. 000)
1	Tercapainya peningkatan sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Jumlah Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang (6)	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000
		Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan (jenis)	Paket (1)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	135.000
			Unit (1)		
2	Tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kutai Timur	Ketersediaan energi	Kkal/Kap/Hari (2.400)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.850,3105
		Ketersediaan Protein	Grm/Kap/Hari (63)		
		Prosentase data NBM	Persen (100)		
3	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Tingkat ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	Persen (100)		
4	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	Ton (100)		
		Jumlah cadangan pangan masyarakat (lumbung pangan)	Unit (18)		
5	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	Desa (5)		
		Prosentase perkembangan SKPG	Persen (100)		
6	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen (90)		
		Penurunan konsumsi beras per kapita	Persen (1)		
7	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Prosentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen (80)		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			Satuan	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp. Juta)
8	Meningkatnya koordinasi antar tingkat pemerintahan melalui Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Kali (3)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.850,3105
		Jumlah Apresiasi Dewan Ketahanan Pangan	Kecamatan (3)		
		Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan yang dibuat	Regulasi (1)		
		Jumlah kecamatan yang diadvokasi	Kecamatan (18)		
9	Tercapainya peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan dalam mendukung ketahanan pangan	Prosentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persen (60)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.471,1995
		Jumlah laporan akuntabilitas pelayanan SKPD	Laporan (3)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	115,00



Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 berikut dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD. Namun pada bulan Oktober 2016 DPA APBD mengalami perubahan alokasi anggaran untuk Belanja Langsung dari sebesar Rp. 4.521.510.000,- menjadi sebesar Rp. 2.685.010.651,- Berikut ini adalah rincian sasaran, kegiatan, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis berdasarkan Program Tahun 2016

No	Program	Anggaran (Rp. )	Realisasi	
			(Rp. )	%
1	Peningkatan Ketahanan Pangan	973.216.255	973.216.255	100,00
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.466.762	75.466.762	100,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	74.342.000	74.342.000	100,00
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.379.960	86.379.960	100,00
5	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.475.605.674	1.475.605.674	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.685.010.651</b>	<b>2.685.010.651</b>	<b>100,00</b>

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah Belanja Langsung yang mendukung kepada Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 973.216.256,- terealisasi sebesar Rp. 973.216.255,- atau 100,00%.

Belum maksimalnya penyerapan anggaran Badan Ketahanan Pangan disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Proses pencairan anggaran yang seharusnya sejak 1 Januari 2016, tetapi mengalami penundaan sampai dengan Maret 2016, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
2. Terbatasnya jumlah personel, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama jaringan telekomunikasi menyebabkan beberapa sering terlambatnya penerimaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

4. Penyusunan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya mengacu pada standar pelayanan ketahanan pangan serta penetapan indikator kinerja yang kurang tepat.

### **3.5. Kendala dan Hambatan Pencapaian Sasaran**

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi Jaminan bahwa seluruh penduduk Kutai Timur pada tahun 2015 yang berjumlah 413.508 jiwa, dapat memenuhi kebutuhannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Hal tersebut bisa terlihat dari:

- a. Hasil analisis SKPG, menunjukkan bahwa sebanyak 61,11% kecamatan di Kutai Timur masuk dalam kategori rawan sampai cukup rawan, baik yang bersifat kronis maupun transien.
- b. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih jauh dari harapan, dimana skor PPH baru mencapai 73.9 point

Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin Kutai Timur tahun 2015 mencapai 6,71%, yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kelompok miskin inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan.

### **3.6 Langkah Antisipasi**

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah.

Pengentasan kemiskinan masyarakat kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan dan pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya untuk sebagian masyarakat yang berada di pedesaan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Simpulan Umum**

Pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan Tahun 2015, secara khusus telah berhasil menimbulkan perubahan di wilayah kecamatan khususnya kelompok sasaran. Program tersebut berhasil: (a) membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman; (b) mewujudkan stabilisasi harga pangan pokok startegis di Kabupaten Kutai Timur; (c) Menurunkan tingkat konsumsi beras; serta (d) penguatan kelembagaan ketahanan pangan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran program / kegiatan secara umum sudah sesuai dengan Renstra kecuali pada dua tahun terakhir sebagai akibat pemecahan lembaga antara ketahanan pangan dan penyuluhan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan, secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari Pembangunan ketahanan pangan.

### **4.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan guna perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Ketahanan Pangan antara lain:

- (1). Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan yang diemban oleh Badan Ketahanan Pangan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur;
- (2). Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-

benar dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

- (3). Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
- (4). Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang ketahanan pangan.
- (5). Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
- (6). Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.
- (7). Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.